



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2001 NOMOR : 77

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 35 TAHUN 2001

TENTANG

TUNTUTAN GANTI RUGI DI KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka dipandang perlu mengatur mengenai tuntutan ganti rugi di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI DI KABUPATEN
SUKOHARJO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo;
- d. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- f. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- g. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan Daerah;

- h. Perangkat Daerah adalah pegawai Daerah bukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- i. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Perangkat Daerah, yang karena perbuatannya dan/atau karena melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, mengakibatkan kerugian Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung;
- j. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau disebabkan oleh kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Perangkat Daerah;
- k. Surat Keputusan Pembebanan adalah Surat Keputusan penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pejabat Pengelola Keuangan daerah atau Perangkat Daerah yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah;
- l. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disebut SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Perangkat Daerah untuk mengembalikan kerugian Daerah;
- m. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyelesaikan kerugian Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan TGR berlaku terhadap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Perangkat Daerah yang bukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang karena perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian Daerah.

BAB III

PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 3

- (1) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan terhadap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Perangkat Daerah yang melakukan suatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah, wajib melaporkan kepada:
 - a. Bupati, apabila dugaan tersebut terhadap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. Pimpinan Perangkat Daerah, apabila dugaan tersebut terhadap Perangkat daerah.
- (2) Bupati atau Pimpinan Perangkat Daerah setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, wajib segera menugaskan atau memohon aparat pengawas fungsional untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian Daerah.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ternyata mengakibatkan kerugian Daerah, maka terhadap yang bersangkutan harus dilakukan TGR.
- (5) TGR sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini dilakukan oleh:
 - a. Bupati, apabila pelakunya adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. Pimpinan Perangkat Daerah, apabila pelakunya adalah Perangkat Daerah.

BAB IV

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 4

- (1) Penyelesaian TGR sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan membuat SKTJM, baik secara tunai atau secara angsuran sebesar dua kali nilai kerugian.
- (2) Angsuran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan paling lama selama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai dengan jaminan barang yang nilainya setara dengan jumlah ganti rugi yang harus dibayar.
- (3) Apabila angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilakukan melalui pemotongan gaji, harus dilengkapi dengan Surat Kuasa.
- (4) Apabila Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Perangkat Daerah yang bersangkutan tidak dapat melunasi angsuran dalam waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka barang jaminan dapat dijual.
- (5) Apabila hasil penjualan barang jaminan ternyata tidak mencukupi, maka Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Perangkat Daerah yang bersangkutan tetap wajib untuk melunasi kekurangannya, dan apabila hasil penjualan barang jaminan ternyata lebih, maka sisa lebihnya dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan penyelesaian atas TGR sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Pasal ini dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Pasal 5

- (1) Apabila upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini tidak berhasil, maka Bupati atau Pimpinan Perangkat Daerah memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Perangkat Daerah yang bersangkutan, dengan menyebutkan:
 - a. Identitas pelaku;
 - b. Jumlah ganti rugi yang harus dibayar;
 - c. Alasan penuntutan dilakukan;
 - d. Memberikan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari untuk memberi kesempatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Perangkat Daerah yang bersangkutan mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Perangkat Daerah yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan / pembelaan diri, atau tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas dari kesalahan / kelalaian, maka Bupati atau Pimpinan Perangkat Daerah menetapkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat dilakukan dengan cara angsuran melalui pemotongan gaji atau penghasilan lainnya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 6

- (1) Apabila Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Perangkat Daerah yang bersangkutan meninggal dunia, atau melarikan diri, atau berada di bawah pengampunan, maka Bupati atau Pimpinan Perangkat Daerah menunjuk pegawai atas saran Majelis Pertimbangan, yang ditugaskan untuk membuat perhitungan jumlah kerugian Daerah yang diakibatkan oleh perbuatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Perangkat Daerah yang meninggal dunia, atau melarikan diri,

atau berada di bawah pengampunan tersebut.

- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada ahli waris, atau keluarga terdekat, atau pengampu dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Perangkat Daerah yang bersangkutan, dan kepadanya diberikan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari untuk memberi kesempatan mengajukan keberatan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ahli waris, atau keluarga terdekat, atau pengampu tidak mengajukan keberatan atau tidak dapat membuktikan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Perangkat Daerah yang bersangkutan bebas dari kesalahan/kelalaian, maka proses TGR selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Apabila Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Perangkat Daerah yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui, atau ahli warisnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, atau yang bersangkutan melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya dan keluarga terdekatnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, maka Bupati atau Pimpinan Perangkat Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, maka kasus Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Perangkat Daerah yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Surat Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini sewaktu-waktu dapat ditagih lagi apabila ahli warisnya atau keluarga terdekatnya dapat dimintai pertanggungjawaban, atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Perangkat Daerah yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Perangkat Daerah yang atas perbuatannya mengakibatkan kerugian Daerah, selain dikenakan TGR juga dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEDALUWARSA

Pasal 9

- (1) TGR dinyatakan kedaluwarsa apabila baru diketahui setelah lewat waktu selama 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun kerugian Daerah.
- (2) TGR khusus terhadap ahli waris atau keluarga terdekat atau pengampu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Perangkat Daerah yang bersangkutan dinyatakan kedaluwarsa apabila baru diketahui setelah lewat waktu selama 3 (tiga) tahun sejak meninggalnya yang bersangkutan tanpa adanya pemberitahuan, atau apabila jangka waktu pengajuan keberatan berakhir tetapi Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah diterbitkan.

BAB VII PENGHAPUSAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Perangkat Daerah, atau ahli waris, atau keluarga terdekat, atau pengampu yang

tidak mampu membayar ganti rugi atas kerugian Daerah, dapat mengajukan permohonan penghapusan atas kewajibannya secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Apabila atas hasil penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan ternyata yang bersangkutan dinyatakan masih mampu berusaha untuk mengembalikan, maka Bupati harus menolak permohonan penghapusan TGR.
- (3) Apabila atas hasil penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan ternyata yang bersangkutan dinyatakan benar-benar tidak mampu, maka Bupati dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan TGR baik sebagian maupun seluruhnya.

BAB VIII PENYETORAN

Pasal 11

Penyetoran atas kerugian Daerah baik secara tunai, angsuran dan hasil penjualan barang jaminan dilakukan di Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima atau Pemegang Kas.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Proses penyelesaian TGR tidak dapat mempengaruhi dan atau mengurangi proses hukum.
- (2) Apabila ditemukan perbuatan melawan hukum dalam masalah TGR, Bupati atau Perangkat Daerah wajib melaporkan pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum tersebut kepada pihak berwajib.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 14**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Desember 2001

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Desember 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

HM. SOEPRAPTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2001 NOMOR 77**

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 35 TAHUN 2001****TENTANG****TUNTUTAN GANTI RUGI DI KABUPATEN SUKOHARJO****I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka menjaga dan mengamankan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab I Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka diperlukan upaya pengamanan terhadap keuangan Daerah tersebut, dan sekaligus upaya penegakan disiplin dan tanggungjawab para pengelolaanya..

Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian dari pegawai Daerah yang mengelolanya, harus diganti oleh yang bersangkutan. Proses untuk mengganti kerugian Daerah tersebut di atas disebut Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi merupakan proses tuntutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, atau tuntutan yang dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah terhadap pegawai Perangkat Daerah, yang karena perbuatan dan / atau kelalaiannya, atau karena yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, mengakibatkan kerugian Daerah.

Untuk menyelesaikan masalah kerugian Daerah tersebut, dibentuk suatu lembaga yang disebut Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati. Tugas dari Majelis Pertimbangan ini adalah membantu Bupati atau Pimpinan Perangkat Daerah dalam menyelesaikan masalah kerugian Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka pengaturan mengenai Tuntutan Ganti Rugi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d e : Cukup jelas.

huruf f : Camat, dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai Pimpinan Perangkat Daerah yang membawahi Perangkat Daerah baik di lingkungan Sekretariat Kecamatan itu sendiri maupun Lurah beserta perangkatnya di wilayah administratif Kecamatan yang bersangkutan..

huruf g : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam pengertian ini misalnya Bendaharawan Umum Daerah, para pejabat pengguna anggaran Daerah, Pemegang Kas.

huruf h s/d l : Cukup jelas.

huruf m : Dalam melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi, Bupati atau Pimpinan Perangkat Daerah dibantu oleh suatu lembaga yang disebut Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi. Majelis Pertimbangan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang susunan keanggotaannya terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah sebagai Ketua.
2. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah sebagai Wakil Ketua.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai Wakil Ketua.
4. Kepala Bidang Verifikasi pada BPKD sebagai Sekretaris.
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah sebagai anggota.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai anggota.
7. Kepala Dinas Pengelola Kekayaan Daerah sebagai anggota.
8. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota.
9. Kepala Bagian Perlengkapan sebagai anggota.

Tugas Majelis Pertimbangan adalah menyelesaikan masalah setiap kali ada persoalan yang menyangkut Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 2 dan Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksudkan dengan upaya damai yaitu bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Perangkat Daerah yang bersangkutan mengakui bahwa perbuatannya mengakibatkan kerugian bagi Daerah, dan selanjutnya yang bersangkutan bersedia atau sanggup membayar ganti rugi sebesar dua kali nilai kerugian dengan membuat Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak.

ayat (2) dan
ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Penjualan barang jaminan tidak dilakukan melalui lelang, akan tetapi melalui penjualan biasa sesuai dengan kewajaran dan kondisi pasar yang ada pada saat itu.

ayat (5) dan
ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Pemberitahuan tertulis yang dimaksudkan di sini adalah pemberitahuan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Perangkat Daerah yang bersangkutan telah melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian Daerah, dan yang bersangkutan harus mengganti kerugian tersebut.

ayat (2) dan
ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 6 dan Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian Daerah baik yang disengaja maupun akibat kelalaian merupakan perbuatan in-disipliner. Oleh karena itu selain dikenakan Tuntutan Ganti Rugi, kepada pelaku yang bersangkutan juga dikenakan tindakan/sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 s/d Pasl 14 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 87